

# PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN PESISIR

Baharudin

(Dosen Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi FITK IAIN Mataram)

Email: baharudin23@yahoo.co.id

## Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah kemiskinan ini adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengkuruan yang berbeda pula. Setelah itu dicari faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kulutural maupun yang bersifat struktural. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu (strategi mengetaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan). Berkaitan dengan konsep kemiskinan, dikalangan para ahli, setidaknya ada tiga macam konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskina relatif dan kemiskinan subyektif. Kemsikinan absolut dirumuskan dengan mmebuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Untuk mengukur itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda yang disebabkan oleh kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan pula kebutuhan dasar kultural (*basic culturek needs*) seperti, pendidikan, keamanan, rekreasi dan sebagainya, disamping kebutuhan fisik.

Kata kunci: *kemiskinan, pendidikan, masyarakat pesisir*

## A. Pendahuluan

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertent berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgment*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep

ini juga memperoleh banyak kritik, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah.<sup>1</sup> Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi tidak layak pada dua - tiga tahun lagi.

Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumsukan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a faxed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya).

Sementara itu, bila dilihat dari dimensi kemiskinan, sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu: perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*). Masing-masing perspektif tersebut memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri yang berbeda dalam menganalisis masalah kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality*, seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Sedangkan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan.<sup>2</sup> Program-program ini antara lain berbentuk intensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan ansional dan ekspor.

---

<sup>1</sup>Pembahasan masalah dimensi kemiskinan antara lain dapat dilihat dalam G.F.R Ellis, *The Dimensions of Poverty*, dalam *Social Indicators reseach*, 1984.

<sup>2</sup>Lihat Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 128

Program-program pembangunan semacam itu memang telah berhasil meningkatkan hasil produksi secara besar-besaran, tetapi ternyata hanya kelompok kaya yang dapat memanfaatkan surplus. Mengapa demikian?, *Pertama*, berkaitan dengan akumulasi modal. Kelompok kaya memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan aset-aset tambahan yang datang bersamaan dengan perkembangan teknologi modern. Konsekuensinyamereka dapat lebih cepat berkembang. *Kedua*, berkaitan dengan fungsi lembaga. Dalam rangka menunjang introduksi teknologi baru, dibentuk lembaga-lembaga ekonomi. Lembaga-lembaga ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya perubahan teknologi fungsi produksi, struktur pasar dan preferensi konsumen ikut berubah. Dalam kenyataannya, lembaga-lembaga semacam ini tidak dapat memberikan fasilitas secara optimal kepada semua lapisan masyarakat. Hanya kelompok kaya yang dapat menikmatinya. kedua hal tersebut menciptakan”kolonialisme internal” dalam kehidupan masyarakat.

Pertanyaan kini, program-program pengetasan kelompok miskin yang dicanangkansekarangini termasukdalam dimensi yang mana? Pertanyaan ini tidaklah mudah untuk dijawab. berdasarkan beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa desa-desa di Indonesia, berkembang menjadi semakin kompleks. Akibat dari program-program pembangunan pedesaan. Proses “produksi-produksi” di pedesaan semakin beragam, struktur kekuasaan semakin plural dan nilai-nilai sosial juga mengalami banyak perubahan.

## **B. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Nelayan Pesisir**

Pemberdayaan sosial masyarakat nelayan pesisir, paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu: dimensi kultural dan dimesi struktural. Dimensi kultural pemberdayaan sosial mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Pemberdayaan kultural ini diperlukan untuk mengatasi kemiskinan kultural, seperti pola hidup konsumtif, rendahnya kemampuan menabung, sikap subsistem, atau resistensi terhadap pendidikan pendidikan formal.

Sementara itu, dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan-perbaikan struktur sosial tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas belayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Di sini tidak ada pretensi untuk selalu membentuk koperasi nelayan karena betapa pun bentuk organisasi yang ada, jamin kepentingansosial ekonomi nelayan adalah hal yang paling penting. Kehadiran organisasi tersebut--yang dijalankan sesuai dengan tingkat budaya

organisasi nelayan setempat--diharapkan juga dapat menjadi institusi alternatif, selain institusi patron-klien seperti ini telah mengakar.

Dalam pemberdayaan nelayan--secara struktur maupun kultural--perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Namun, pendekatan yang unik pun tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks kehidupan nelayan. Banyak variabel yang memberi pengaruh pada keunikan itu secara sosiologis maupun ekologis, sehingga pendekatan pemberdayaan nelayan Jawa, dan luar Jawa seperti Nusa Tenggara Barat misalnya harus berbeda seiring dengan perbedaan sosiologis (struktur, kultur, dan formasi sosial) maupun ekologis diantara keduanya.<sup>3</sup>

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, semua itu belum memberikan perubahan yang cukup berarti. Hal ini mungkin disebabkan pendekatan yang dilakukan bersifat satu arah dengan memberikan posisi pembela dan yang dibela. Dalam hal ini, nelayan sebagai pihak yang menghadapi kesulitan hanya diposisikan sebagai yang dibela, tetapi tidak sebagai orang dapat membela kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan nelayan tidak cukup hanya dengan melakukan advokasi, tetapi hendaknya melalui suatu proses pemberdayaan.

Proses pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan jika adasikap proaktif dari masyarakat nelayan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sikap proaktif nelayan ini meliputi program perencanaan, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan evaluasi, serta berperan dalam pengambilan keputusan karena proses pemberdayaan bertujuan untuk melakukan perubahan individu yang diikuti perubahan kelembagaan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Soloman dalam Hikam<sup>4</sup> bahwa tujuan proses pemberdayaan adalah untuk menolong klien supaya:

1. mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri mereka dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi,
2. ilmu pengetahuan dan skill (keahlian dan keterampilan) pekerja sosial dapat digunakan klien secara optimal,
3. pekerja sosial sebagai mitra yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya,

---

<sup>3</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002, hal.110

<sup>4</sup>Soloman dalam Hikam, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

4. struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka agar dapat memberikan pengaruh pada kehidupan mereka.

Tingkatan upaya untuk melakukan perubahan individu dan lembaga sosial yang berpegang berbeda-beda, sesuai kekompleksan masalah yang dihadapi dalam komunitas tersebut. Perubahan dapat saja terjadi hanya dengan sebuah intensif atau rangsangan yang menggugah kesadaran individu itu. Namun, dalam kondisi lain, perubahan baru dapat terwujud dengan melakukan rekayasa sosial yang melibatkan pihak luar secara aktif. Oleh sebab itu dalam melaksanakan proses pemberdayaan dituntut kejelian, melihat masalah dan menentukan sumber permasalahan. Hikam menyatakan, ada tiga tingkatan pelaksanaan pemberdayaan yang harus dilakukan berdasarkan tahapannya, yaitu:

1. pengalaman positif dalam keluarga untuk memberikan rasa percaya dan persaingan dalam interaksi sosial.
2. memaksa kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sosial dan menggunakan institusi sosial (sekolah) untuk memperoleh kompetensi,
3. mereka dapat menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, terdapat beberapa model pemberdayaan, antara lain yaitu: program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan prinsip *to help themselves*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP, dorongan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan.

Kegiatan PEMP meliputi pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat--yang meliputi pengembangan kegiatan, pengembangan sumber daya laut dan pesisir yang berbasis masyarakat sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi--dan peningkatan fasilitas masyarakat dalam akses permodalan, serta pengembangan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat. Untuk mendukung program tersebut, perlu dibangun kemitraan antara masyarakat, aparat, dan pihak swasta dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai.

Model pengembangan PEMP diawali dengan tahapan indentifikasi potensi dan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar tentang

---

<sup>5</sup>Harry Hikam, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung HUP, 2001, h

daerah. Informasi dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan program ini adalah informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya pesisir, sumber daya manusia, kegiatan usaha perikanan, sarana dan prasarana, kelembagaan sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Informasi atau data yang diperoleh akan melewati proses analisis data hingga menghasilkan susunan program pengembangan PEMP.

Adapun analisis data dilakukan untuk menghasilkan program-program pengembangan PEMP. Program-program yang perlu dikembangkan mencakup program ekonomi, program sosial, dan program lingkungan serta infrastruktur.

Program-program itu hendaknya berbasiskan kemampuan lokal, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih. Dalam hal ini, program sosial dan program lingkungan serta infrastruktur dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, program sosial dilaksanakan juga untuk mengembangkan budaya lokal dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi program kepada seluruh stakeholder untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan program yang telah disusun. Implementasi program dilaksanakan dalam bentuk pemilihan calon peserta, pelatihan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, pelaksanaan kegiatan sosial, lingkungan dan fasilitas. Dalam implementasi program, masyarakat selalu mendapatkan pendampingan dari Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang telah dilatih terlebih dahulu.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah *monitoring* dan evaluasi untuk memantau implementasi program serta mengkaji ulang kelemahan dan kelebihan dari program serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi. *Monitoring* dan evaluasi harus selalu dilakukan agar didapat perbaikan-perbaikan dalam program kerja berikutnya sehingga semakin mengarah pada program yang sempurna.

### **C. Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan masyarakat Nelayan Pesisir**

Berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah sejak pertemuan Kepala Negara dengan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VI pada tahun 1993 dengan diluncurkannya Inpres Desa Tertinggal (Inpres No. 5/1993) pada 20.633 desa miskin. Program IDT ini diharapkan menjadi gerakan moral yang memberi kesempatan partisipasi

pada semua pihak, terutama pendidikan miskin itu sendiri. Penduduk miskin yang bergabung dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat memperoleh dana 20 juta untuk desa sebagai modal kerja untuk menggerakkan kegiatan perekonomian. Secara spesifik, sasaran program ini adalah meningkatkan sosial-ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pematapan kelembagaan usaha bersama kelompok miskin tersebut.

Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan tersebut, sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat ke permukaan. Dalam kenyataannya, jumlah golongan miskin semakin besar, bahkan terus membengkak. Mengapa demikian? Mengapa bermacam-macam program pembangunan ekonomi masyarakat nelayan pesisir yang selama ini dicanangkan pemerintah tidak efektif? Mengapa bermacam-macam bantuan yang diluncurkan pemerintah tidak menyentuh kelompok nelayan pesisir miskin? Persoalan ini memaksa kita untuk lebih menelaah kembali dimensi struktural kemiskinan masyarakat nelayan pesisir itu sendiri.

Secara sosiologi, dimensi struktural kemiskinan dapat ditelusuri melalui *institutional arrangement* hidup dan berkembang dalam masyarakat nelayan pesisir kita. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan masyarakat pesisir tidak semata-mata berakar pada “kelemaha diri”, sebagaimana dipahami dalam perspektif kultural seperti diungkapkan di atas. Kemiskinan masyarakat pesisir semacam ini justru merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan strategi pembangunan ekonomi masyarakat nelayan pesisir yang selama ini dicanangkan serta dari pengambilan posisi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi itu sendiri.<sup>6</sup> Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada masyarakat nelayan pesisir, sedikit tidak memberikan kontribusi terhadap kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan pesisir. berkaitan dengan ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijakan pendidikan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan itu mencakup usaha meningkatkan keterampilan teknis melalui pendidikan kejuruan dan peningkatan keahlian (profesionalisme). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun sayangnya, sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi masih

---

<sup>6</sup>Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 131-132

bekum terjangkau oleh masyarakat umum. Jagad pendidikan kita masih tampak bagaikan kemasan barang *luxusry*, terlalu mewah.

Sebenarnya, pementah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijakan pendidikan yang diharapkan memacu pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan itu mencakup usaha peningkatan keterampilan teknis melalui pendidikan kejuruan dan peningkatan keahlian (*profesionalsme*). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui pendekatan perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun sayangnya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi masih belum terjangkau oleh masyarakat umum. Jagad pendidikan di Indonesia masih tampak bagaikan kemasan barang *luxury* terlalu mewah.

Hampir semua perguruan tinggi negeri di segala penjuru tanah air, dalam beberapa tahun terakhir ini memang memperoleh kucuran anggaran yang lumayan besar. Anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar semakin diperbesar. Rasio dosen-mahasiswa terus diusahakan untuk diperkecil. Namun persoslannya siapa yang menikmatinya? kelihatannya, kebanyakan adalah anak-anak dari golongan menengah ke atas. Orang tua mampu membayar pendidikan ekstra di luar jam pelajaran sekolah. Karena itu, tidak mengherankan apabila mereka lebih mampu mengerjakan ujian saringan yang masih didominasi oleh tes obyektif itu. Mereka yang gagal diterima diperguruan tinggi negeri, kemudian berbondong-bondong masuk ke perguruan tinggi swasta. Biaya belajar diperguruan tinggi swasta kini semakin mahal, terutama karena sebagian besar anggaran pendidikan dibebankan kepada mahasiswa. Di sinilah, kerap kali tampak adanya kepincangan. Di satu pihak, mahasiswa dari keluarga kaya memperoleh subsidi pendidikan karena dapat diterima diperguruan tinggi negeri. Di lain pihak, mahasiswa dari keluarga yang relatif miskin harus membayar mahal, karena hanya diterima diperguruan tinggi swasta, yang *notabenenya* belum mampu menghasilkan sarjana-sarjana mandiri secara profesional dapat menciptakan atau mengisi kesempatan kerja.

Secara jujur, diakui bahwa belum banyak jumlah perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta yang sudah mampu menghasilkan sarjana-sarjana mandiri dan secara profesional dapat menciptakan atau mengisi kesempatan kerja. Kualitas mereka belum begitu memuaskan. Tidak mudah menerangkan mengapa kenyataan semacam ini masih terus terjadi. Masih banyak staf pengajar yang belum-belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan perspektif guna menelaah masalah-masalah kemasyarakatan. Kurikulum yang ditawarkannya juga belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Demikian pula silabus yang dibuat belum terjabarkan dan belum menjawab tuntutan atau



perkembangan keadaan. Unit-unit perpustakaan juga belum dimanfaatkan secara optimal. Semua kenyataan ini telah menyulitkan proses pengangkatan sumber daya manusia yang handal.

Berangkat dari ini semua, maka pendidikan bagi masyarakat nelayan ke depan hendaknya dikembangkan dalam rangka memberikan berbagai harapan baru serta mampu memberikan pengetahuan dan skill, dengan demikian, masyarakat menjadi lebih berdaya. Memang, pengembangan pendidikan bukanlah pekerjaan sederhana. Karena memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini perencanaan berfungsi untuk membantu memfokuskan pada sasarannya, pengalokasiannya dan kontinuitasnya. Sebagai suatu proses berpikir untuk menentukan apa yang akan dicapai, bagaimana mencapainya, siapa yang mengerjakannya dan kapan dilaksanakannya, maka perencanaan juga memerlukan adanya kejelasan terhadap masa depan yang akan dicapai atau dijanjikannya. Oleh karena itu, dalam perencanaan ada semboyan bahwa: *Luck is the result of good planning, and good planning is the result of information well applied*<sup>7</sup>.

Selain perencanaan yang baik dan tepat, menurut Abdullah Fadjar,<sup>7</sup> untuk mengembangkan pendidikan yang lebih arif juga perlu didukung dengan kegiatan “riset dan evaluasi”. Dalam kajian Abdullah, riset dan evaluasi pendidikan merupakan dua jurus “*empirical inquiry*” yang dapat dijadikan landasan pengembangan secara bijak. Sayangnya kegiatan riset dan evaluasi pendidikan itu sampai sekarang belum ada yang menekuninya. Meskipun dalam berbagai pembicaraan dan diskusi seputar pembinaan dan pengembangan pendidikan sering disebut-sebut perlunya memiliki “Lembaga Riset dan evaluasi pendidikan” atau “Research and Development (R dan D)”.

Pendidikan bagi masyarakat nelayan di Indonesia, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Hal ini terlihat dari masih minimnya fakultas, jurusan, dan program studi yang ada baik diperguruan tinggi negeri maupun swasta. dipandang sebelah mata atau dapat dikatakan langka, baik yang negeri maupun swasta, namun belum menjadi kekuatan aktual, karena pendidikan masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara mikro yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan ini tentu menuntut adanya pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh dan menjanjikan masa depan. Pembenahan dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: *macroscopic* (tinjauan makro) dan *microscopic* (tinjauan mikro). Dalam pendekatan *macroscopic* pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang

---

<sup>7</sup>Abdullah Fadjar, *Strategi Pengembangan pendidikan Islam melalui riset dan evaluasi*. Dalam pendidikan Islam di Indonesia antara cita dan fakta, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan microscopic pendidikan dianalisis sebagai salah satu kesatuan unit yang hidup dimana terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri.

Dua pendekatan yang disebut di atas bersifat saling melengkapi, terutama di tengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti saat ini. Oleh karena itu, kalau ingin menatap masa depan pendidikan yang mampu memainkan peran strategis dan diperhitungkan untuk dijadikan alternatif masa depan, maka perlu adanya keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan dengan: *pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. *Kedua*, pemberdayaan (*empowerming*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaharuan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemennya. *Keempat*, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan.

Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan pendidikan dapat berperan lebih artikulatif di masa yang akan datang. Sesungguhnya harus disadari, secara kualitatif lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang ini muncul serta dinilai “terkemuka” (*outstanding*, masih jauh dari tuntutan ideal. Karena, memang dalam bahasa pengembangan pendidikan berlaku adagium: “*start from the begining to the end, and end for the begining*”.

Dengan pendidikan perikanan yang bermutu, maka masyarakat nelayan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahliannya dalam mengelola potensi kelautan, apalagi potensi kelautan bangsa Indonesia sangat besar. Dengan peningkatan pengetahuan dan keahliannya, para nelayan segera beranjak dari kemiskinannya menuju masyarakat nelayan yang lebih berdaya dan lebih sejahtera secara ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- G.F.R Ellis, *The Dimensions of Poverty*”, dalam *Social Indicators reseach*, 1984.
- Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002.
- Soloman dalam Hikam, *Pemberdayaan Massyarakat Nelayan*, Jakarta Pustaka Pelajar, 2001
- Harry Hikam, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung HUP, 2001.
- Abdulah Fadjar, *Strategi Pengembangan pendidikan Islam melalui riset dan evaluasi*. Dalam pendidikan Islam di Indonesia antara cita dan fakta, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.